

ABSTRAK

Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam melakukan pergantian atau melanjutkan suatu pemerintahan. Dalam setiap proses pemilu, selalu terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap asas-asas pemilu lebih khusus terhadap asas jujur dan adil. Masalah ini selain faktor budaya hukum, juga ditengarai isi hukum pemilu yang menyediakan berbagai jenis dan istilah pelanggaran, serta banyaknya lembaga yang ikut terlibat dalam penegakan hukum pemilu. Jenis pelanggaran dan banyaknya lembaga ini memberikan ruang munculnya persoalan-persoalan baru dalam penegakan hukum pemilu, karena beda tafsir dan pendapat dalam menangani persoalan pemilu, dan ini menjadikan semakin ribetnya penegakan hukum pemilu. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa dan menemukan pengaturan penyelesaian sengketa pemilu dan apakah telah sesuai dengan dengan konsep keadilan pemilu serta menemukan konsep ideal mengenai penyelesaian sengketa pemilu berdasarkan keadilan pemilu. Penelitian ini adalah penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan filosofi, pendekatan sejarah, pendekatan perbandingan, pendekatan futuristik dan pendekatan konseptual. Menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier, dan metode analisis penalaran doktrin hukum dan preseden serta metode berpikir filsafat hukum, hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penegakan hukum pemilu terbagi ke dalam beberapa jenis yaitu, pelanggaran administrasi pemilu, pelanggaran administrasi pemilu yang terjadi secara terstruktur, sistematis dan massif, pelanggaran tindak pidana pemilu, pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya, dan sengketa proses pemilu serta perselisihan hasil pemilu. Penyelesaiannya tersebar di banyak lembaga, dan dinilai belum memberikan keadilan sebagaimana dimaksud dalam keadilan pemilu. Penelitian ini menyarankan dilakukannya penyederhanaan terhadap jenis-jenis pelanggaran, sengketa proses dan perselisihan hasil menjadi satu istilah yaitu sengketa pemilu termasuk didalamnya sengketa pasca pemilu. Sementara terhadap pidana pemilu diselesaikan melalui pendekatan hukum pidana umum dengan terlebih dahulu dilakukan transformasi sanksi pidana menjadi sanksi administrasi. Penyelesaian sengketa pemilu ini dilakukan melalui peradilan pemilu dengan membentuk Mahkamah Pemilu dalam bentuk kamar khusus di Mahkamah Konstitusi.

Kata kunci: pemilu, penyelesaian sengketa pemilu, kamar khusus.

Reconstruction of General Election Dispute Resolution in the Perspective of Electoral Justice

ABSTRACT

Elections are a means of exercising the sovereignty of the people in changing or continuing a government. In every electoral process, there are always violations of the principles of elections, more specifically the principle of fairness and honesty. This problem is not only caused by legal culture, but also by the content of electoral law, which provides various types and terms of violations, as well as the number of institutions involved in enforcing electoral law. The types of violations and the number of institutions provide space for new problems to arise in enforcing election law, due to different interpretations and opinions in dealing with election issues, and this makes election law enforcement more complicated. The purpose of this study is to analyze and find the electoral dispute resolution arrangements and whether they are in accordance with the concept of electoral justice and to find an ideal concept of electoral dispute resolution based on electoral justice. This research is normative legal research using a statutory approach, philosophical approach, historical approach, comparative approach, futuristic approach and conceptual approach. Using primary, secondary and tertiary legal materials, and the method of analysis of legal doctrine reasoning and precedent as well as the method of thinking legal philosophy, the results of this study show that election law enforcement is divided into several types, namely, election administration violations, election administration violations that occur in a structured, systematic and massive manner, election crime violations, violations of the election organizer's code of ethics, violations of other laws and regulations, and election process disputes and disputes over election results. The resolution is spread across many institutions, and is considered not to provide justice as intended in electoral justice. This research suggests simplifying the types of violations, process disputes and disputes over results into one term, namely election disputes, including post-election disputes. Meanwhile, election crimes are resolved through a general criminal law approach by first transforming criminal sanctions into administrative sanctions. The resolution of election disputes is carried out through the electoral court by establishing the Election Court in the form of a special chamber in the Constitutional Court.

Keywords: election, electoral dispute resolution, special chamber.